

**PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Survei Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat)**

**Pembimbing:
Dian Dwinita Kurniawaty, SE., M.Si.
NIP. 4127.34.03.013**

**Oleh:
Abdurahman Ali
NIM. 21114226**

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
E-mail : aliatunikom@gmail.com**

Abstract

Financial Statements of the Regional Government of Bandung City in 2017 still get a Fair Opinion with Exceptions. The Bandung City Financial Report is still declared the same because of asset issues. There are some assets that are not recorded, their whereabouts are unknown and their utilization is unclear. With the entry into force of the accrual system since 2015, the government must provide more competent human resources, but in fact, currently some local governments in West Java, one of which is the city of Bandung, are still hampered by the lack of quality human resources in presenting financial reports. This study uses Regional Asset Management and Human Resource Competence as independent variables and the Quality of Local Government Financial Reports as the dependent variable. This study aims to determine the effect of management of regional assets and human resource competencies on the quality of local government financial reports in the city of Bandung. The method used in this research is descriptive and verification method. Research results show that Regional Asset Management has a significant effect on the quality of Local Government Financial Reports on the Financial and Asset Management Agency of Bandung City with low and positive correlation categories. Similarly, the Competence of Human Resources has a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports on the Financial and Asset Management Agency of Bandung City with a low and positive category.

Keywords: Regional Asset Management, Human Resource Competence, Quality of Local Government Financial Reports.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan (Dadang Suwanda 2015:60-61). Laporan

keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitas laporan keuangan yang mana adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan keuangan (Mursyidi, 2013:47). Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah sendiri adalah untuk menyajikan informasi akuntansi yang berguna untuk pengambilan

keputusan (Erlina Rasdianto, 2015:20). Karakteristik laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Mursyidi, 2013:47).

Setiap tahunnya Badan Pengawas Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan dilaksanakan oleh BPK, akan melaksanakan pemeriksaan dan pengambil keputusan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan BPK sebagai pemeriksa yang independen akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar normatif pemeriksaan BPK yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (Dadang Suwanda 2015:85).

Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset dari tahun ke tahun yang cukup signifikan (Dadang Suwanda, 2015:7). Permasalahan pencatatan atau penatausahaan merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena beragamnya data pencatatan akuntansi pemerintahan, lebih lanjut, tidak semua datanya telah lengkap / dimiliki dengan benar dan pencatatannya belum terintegrasi dalam satu wadah informasi pengelolaan aset (M. Yusuf, 2015:10).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017 masih mendapatkan Opini WDP. Laporan Keuangan Kota Bandung masih dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP), masih karena persoalan aset. Ada beberapa aset yang tidak terdata, tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya belum jelas. (Arman Syifa, 2018).

Inventarisasi aset harus dilaksanakan dengan baik agar administrasi aset tertata dengan baik dan juga aset dapat diketahui keberadaan, pemanfaatan, pengamanan, pengendalian dan pengawasannya (A. Gima Sugiana, 2013: 173). Masih belum optimalnya Pemerintah melakukan investarisasi dan penataan aset daerah akan berdampak dalam rangka memperbaiki laporan keuangan, dengan begitu inventarisasi aset penting dilakukan untuk mendapatkan opini WTP (Mustakim Fatawari, 2016). Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu (A. Gima Sugiana, 2013: 173). Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah dan seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (investasi), hibah ataupun dari cara lainnya (A. Gima Sugiana, 2013: 173).

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi dan dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (Indra Kesuma dkk, 2014).

Dengan berlakunya sistem akrual sejak tahun 2015 maka pemerintah harus menyediakan SDM yang lebih kompeten, namun kenyataannya, saat ini beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat seperti Cimahi, Bandung Barat, Subang dan Bandung Kota masih terhambat pada kualitas sumber daya manusianya yang belum mumpuni dalam menyajikan laporan keuangan (Arman Syifa, 2017).

Sejauh ini, kompetensi SDM di bagian keuangan setiap SKPD bisa dibilang berbeda-

beda, ada yang sudah handal, ada juga yang belum, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih perlu adanya penyesuaian dengan sistem akrual yang ditetapkan pada tahun 2015 dan juga penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 (Idad Irawan Hamzah, 2019).

Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi yang tersedia, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem yang ada dengan baik, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi (I Putu Upabayu Rama Mahaputra, 2014). Sumber daya manusia merupakan faktor kunci utama dalam penyajian laporan keuangan untuk meraih opini WTP, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut diperlukan SDM yang mampu menguasai ilmu akuntansi dengan baik, memiliki pengalaman di bidang keuangan, dan didukung dengan pelatihan-pelatihan tentang akuntansi oleh pemerintah daerah (Syahrir, 2015).

Penelitian terdahulu yang terkait variabel pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Gina Lucita (2016), menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian Abdul Halim (2013), menyatakan bahwa pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang terkait variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Wiwik Andriani dalam I Putu Upabayu Rama Mahaputra (2014), menyatakan bahwa kapasitas kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah. Kemudian hasil penelitian Hardyansyah (2016), Kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan, fenomena dan teori yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat)”** menggunakan pegawai pada BPKA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai responden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat, maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris atas kualitas laporan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh pengelolaan aset daerah dan kompetensi sumber daya manusia dengan menggunakan data yang diperoleh untuk memecahkan masalah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah bagi instansi pemerintah dalam mengatasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang belum baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya, dijadikan sebagai acuan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengelolaan Aset Daerah

Pengertian pengelolaan aset daerah menurut M. Yusuf (2015:33), adalah sebagai berikut :

“Pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi”.

Pengertian pengelolaan aset daerah menurut Siregar (2004:518), adalah sebagai berikut :

“Pengelolaan aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, dan optimalisasi pemanfaatan, di mana tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya”.

Menurut Siregar (2004:518) indikator dalam pengelolaan aset daerah adalah Inventarisasi aset, Legal audit, Penilaian aset dan Optimalisasi aset

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi menurut Ardeno Kurniawan (2015:118) adalah “Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya”.

Menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L. Gaol (2015:44) “Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif)”.

Menurut Moeheriono (2012:6) indikator kompetensi sumber daya manusia adalah Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*) dan Sikap (*Attitude*).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dadang Suwanda (2015:71), yaitu “Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normatif (aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku) yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan yaitu sebagai pengambilan keputusan”.

Menurut Dadang Suwanda (2015:71) indikator LKPD yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

M. Yusuf (2015:9) menyatakan bahwa “Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik”.

Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa “Penatausahaan aset yang baik sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan”.

Pernyataan-pernyataan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuldi Poae (2017), yang menyatakan bahwa penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah (pengelolaan aset daerah) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Juga penelitian oleh Anshori (2016), yang menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang mencakup inventarisasi, penilaian, pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik daerah aset daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

M. Yusuf (2013:154) mengemukakan bahwa “Apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik, itu juga karena pegawainya kurang kompeten”.

Warisno dalam Indra Kesuma (2014:76) mengemukakan bahwa “Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah”.

Dewi Andini (2015:1) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa “Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan”.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono (2017:2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli. Metode ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Pengelolaan Aset Daerah (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Verifikatif menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasionalisasi variabel

Menurut Sugiyono (2017:39) definisi dari operasionalisasi variabel adalah “Suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan cara menyebarkan kuisioner ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) definisi populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:68) “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel”.

Maka dari itu, jumlah sampel yang akan diteliti yaitu 108 orang responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.

3.4.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, kemudian hasil data untuk diolah ke dalam statistik. Untuk menilai kuesioner apakah valid dan realibel maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah sehingga diperoleh kesimpulan.

3.6.2 Analisis Data Metode Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS 2.0.M3*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisisioner yang disebar kepada 108 orang responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan (*coding*) serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *Partial Least Square (PLS)* untuk menganalisis Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.1.1 Pengukuran Kualitas Alat Ukur Penelitian

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*) berupa butir *item* pernyataan yang diajukan kepada responden

telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

4.1.1.1 Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas $> 0,30$.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pengelolaan Aset Daerah (X ₁)	Item 1	0,711	0,3	Valid
	Item 2	0,77	0,3	Valid
	Item 3	0,755	0,3	Valid
	Item 4	0,779	0,3	Valid
	Item 5	0,797	0,3	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	Item 6	0,498	0,3	Valid
	Item 7	0,675	0,3	Valid
	Item 8	0,702	0,3	Valid
	Item 9	0,725	0,3	Valid
	Item 10	0,76	0,3	Valid
	Item 11	0,718	0,3	Valid
	Item 12	0,785	0,3	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Item 13	0,44	0,3	Valid
	Item 14	0,496	0,3	Valid
	Item 15	0,83	0,3	Valid
	Item 16	0,812	0,3	Valid
	Item 17	0,843	0,3	Valid
	Item 18	0,811	0,3	Valid
	Item 19	0,79	0,3	Valid

Pada tabel di atas, dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 ($>0,30$), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

4.1.1.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pengelolaan Aset Daerah (X ₁)	0,82	0,7	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,785	0,7	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,821	0,7	Reliabel

Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Pengelolaan Aset Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Pengelolaan Aset Daerah, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari empat *item* indikator yaitu Inventarisasi Aset, Inventarisasi Aset, Penilaian Aset.

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pengelolaan Aset Daerah sebesar 67,41% berada di antara interval 52,01% - 68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan Aset Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Pengelolaan Aset Daerah.

4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) *item* indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Sikap (Attitude).

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 2517 (66,59%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kompetensi Sumber Daya Manusia.

4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri

dari 4 (empat) *item* indikator: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 2464 (65,19%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 11 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Pengelolaan Aset Daerah (X_1) yang dikur dengan 4 variabel manifes, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) dengan 3 variabel manifes dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan 4 variabel manifes.

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 108 orang responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung menggunakan *software SmartPLS*.

4.1.4.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifestnya* (*measurement model*). Untuk

mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas.

Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

1. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software SmartPLS* dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus $\geq 0,5$.

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Pengelolaan Aset Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai $\geq 0,7$ yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

Nilai AVE dan nilai *communality* setiap variabel laten melebihi batas yang ditentukan yakni $\geq 0,5$ (Imam Ghozali, 2013:110) yang berarti semua variabel laten memiliki validitas yang baik.

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222).

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator

yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi (Imam Ghozali, 2013:212).

3. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,132. Nilai GoF sebesar 0,363 tergolong kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong kuat karena $> 0,36$ (Uce Indahyanti, 2013).

4.1.4.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values*. Nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,367 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,216. Diperoleh model persamaan structural yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Aset Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 11,9% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan kontribusi pengaruh sebesar 7,3% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,193 atau 19,3%. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 19,3% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sedangkan sebanyak ($1-R^2$) 80,7% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian hipotesis.

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.2.1 Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,807 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,982 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKA Kota Bandung.

Fenomena yang terjadi yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017 masih mendapatkan Opini WDP. Laporan Keuangan Kota Bandung masih dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP), masih karena persoalan aset. Ada beberapa aset yang tidak terdata, tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya belum jelas. Padahal permasalahan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih ada sejumlah

masalah administratif di Pemkot Bandung yang belum dituntaskan dalam laporan keuangan 2017 seperti pengelolaan aset. Sebenarnya perkembangan Kota Bandung dalam menilai aset lebih bagus dibanding tahun lalu, namun perkembangan itu belum cukup untuk mencapai WTP karena kita masih menemukan permasalahan (Arman Syifa, 2018).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui hasil deskriptif Pengelolaan Aset Daerah dengan persentase 66,30% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 33,7%. Dan termasuk indikator fenomena nya yaitu inventarisasi aset yang memiliki persentase 66,30% dan terdapat *gap* sebesar 33,7% merupakan masalah pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Pengelolaan Aset Daerah (X_1) berpengaruh sebesar 11,9% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,393 yang berarti Pengelolaan Aset Daerah memberikan pengaruh yang sedang dengan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKA Kota Bandung. Arah hubungan positif Pengelolaan Aset Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah yang semakin baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula. Sedangkan sisanya 88,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori M. Yusuf (2015:9) yang menyatakan Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Dan teori dari Dadang Suwanda (2015:8) yang menyatakan bahwa Penatausahaan aset yang baik sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuldi Poae (2017), yang menyatakan bahwa penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah (pengelolaan aset daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Juga penelitian oleh Anshori (2016), yang menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang mencakup inventarisasi, penilaian, pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik daerah aset daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,359 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,982 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKA Kota Bandung.

Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu dengan berlakunya sistem akrual sejak tahun 2015 maka pemerintah harus menyediakan SDM yang lebih kompeten, namun kenyataannya, saat ini beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat seperti Cimahi, Bandung Barat, Subang dan Bandung Kota masih terhambat pada kualitas sumber daya manusianya yang belum mumpuni dalam menyajikan laporan keuangan (Arman Syifa, 2017).

Sejauh ini, kompetensi SDM di bagian keuangan setiap SKPD bisa dibilang berbeda-beda, ada yang sudah handal, ada juga yang belum, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih perlu adanya penyesuaian dengan sistem akrual yang ditetapkan pada tahun 2015 dan juga penyesuaian dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 (Idad Irawan Hamzah, 2019).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui hasil deskriptif dari Kompetensi SDM dengan persentase sebesar 66,59% (cukup baik) dan ada gap sebesar 33,41% hal ini menandakan adanya masalah pada penelitian ini. Kemudian indikator fenomena pada variabel ini adalah pada Keterampilan dengan persentase 65,68% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 34,32%. Hal ini menandakan adanya masalah pada indikator keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh sebesar 7,3% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,340 yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan korelasi yang rendah dengan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKA Kota Bandung. Arah hubungan positif Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin baik akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pula.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori M. Yusuf (2013:154) yang menyatakan Apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik, itu juga karena pegawainya kurang kompeten. Kemudian teori dari Warisno dalam Indra Kesuma (2014:76) yang menyatakan bahwa Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Andini

(2015:1), menyatakan bahwa Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Dan penelitian dari As Syifa Nurillah (2014) menyatakan bahwa Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi SDM, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Dengan kategori korelasi rendah dan positif, yang artinya semakin baik Pengelolaan Aset Daerah maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan Pengelolaan Aset Daerah belum maksimal yaitu Inventarisasi Aset. Sehingga Pengelolaan Aset Daerah kurang maksimal. Dan berimbas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal. Pada penelitian ini Pengelolaan Aset Daerah yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung berada dalam kriteria cukup baik,

tetapi hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada Pengelolaan Aset Daerah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Dengan kategori rendah dan positif, yang artinya semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan semakin baik pula kualitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun ada yang menyebabkan Kompetensi Sumber Daya Manusia belum maksimal yaitu kurang mendukungnya keterampilan. Sehingga penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang maksimal. Dan berimbas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal. Pada penelitian ini Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung berada dalam kriteria cukup baik, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada Kompetensi Sumber Daya Manusia.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung perlu lebih cermat lagi dalam melakukan inventarisasi aset dengan cara memperbaiki atau lebih meningkatkan sistem informasi yang ada, ubah basis data yang masih dalam media cetak ke media digital, dan mempercepat proses pelegalan aset,. Juga diharapkan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya agar kinerja

nya lebih baik lagi. Dapat di tingkatkan dengan ikut serta dalam kegiatan internal misalkan diklat atau eksternal misalkan melanjutkan studi. Hal ini diperlukan untuk membantu memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima Sugijama. 2013. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama, Bandung: Guardaya Intimarta.
- Abdul Halim. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 13, Nomor 02. ISSN 1693-0908
- CHR, Jimmy L, Gaol.2015. *Human Capital Management Sumber Daya Manusia Konsep, Teori, Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Public Dan Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo Anggota IKP
- Dadang Suwanda 2015 *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen
- Dewi Andini, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal. Pekanbaru. Melalui: <<http://www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/62/58>>
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gina Lucita. 2015. *Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinah Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Negara, Volume 21 Nomor 1, April 2015.
- Hardyansyah. 2016 *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

- I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2: 230-244. ISSN 2302-8556.
- Indra Kesuma dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala. ISSN: 2302-0164. PP.73-82.
- M. Yusuf. 2015, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Martinis Yamin & Bansu I. Ansari. (2009). *Taktik Pengembangan Kemampuan Individual Siswa*. Jakarta : Gaung Persada Perss.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam kosnteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi & otonomi daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal Desember 2018
- Yuldi Poae.2017.*Pengaruh pengelolaan barang milik daerah/aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jurnal riset akuntansi dan auditing Vol 8 No 1.
- Yedi Supriadi. 2017. Tak Kunjung WTP Kota Bandung Masih Terganjil Masalah Aset www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/10/31/tak-kunjung-wtp-kota-bandung-masih-terganjal-masalah-aset-412728
- Laporan Keuangan Kota Bandung WDP Lagi, Ridwan Kamil Tetap Optimistis <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070>
- SDM Pemda Belum Cakap Olah Laporan Keuangan Berbasis Akrual <http://www.rmoljabar.com/read/2016/06/06/21539/SDM-Pemda-Belum-Cakap-Olah-Laporan-Kuangan-Berbasis-Akrual->